

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN 2011



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2010**

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengembangan Hortikultura Tahun Anggaran 2011 dirancang sebagai acuan untuk memberikan informasi terkait dengan program, kebijakan, strategi dan kegiatan pengembangan hortikultura, sistem monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja dan keuangan.

Dalam rangka mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan menselaraskan antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan diperlukan acuan yang disusun secara lengkap dan terstruktur. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki mekanisme perencanaan program dan anggaran yang berbasiskan kinerja serta sistem pelaporannya.

Dengan semangat otonomi daerah saat ini, pembangunan hortikultura tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Anggaran untuk pengembangan hortikultura sudah dialokasikan ke daerah dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima anggaran APBN diwajibkan melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menyampaikan laporan kinerja dan keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga informasi yang tertuang dalam buku ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan

pengembangan hortikultura dan menunjang pertanggungjawaban kinerja serta laporan kegiatan pengembangan hortikultura yang dibiayai melalui dana APBN.

Jakarta, Desember 2010
Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp. I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	4
C. Ruang Lingkup	5
BAB II : SASARAN, PROGRAM, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2011	7
A. Sasaran	7
B. Program Pengembangan Hortikultura	11
C. Arah Kebijakan	13
D. Strategi	16
BAB III : RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2011	21
A. Program	21
B. Kegiatan	21
BAB IV : STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2011	29
BAB V : PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TA. 2011	31
A. Kegiatan yang Dibiayai Dana Bantuan Sosial ...	31

	B.	Kelompok Sasaran	32
	C.	Kriteria dan Persyaratan Teknis Calon Kelompok Sasaran	33
BAB VI	:	SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN	
BAB VII	:	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA	43
	A.	Monitoring dan Evaluasi.....	43
	B.	Pelaporan SIMONEV.....	47
	C.	Kegiatan-Kegiatan MONEV dan Pelaporan.....	51
BAB VIII	:	PENUTUP	55
Lampiran 1	:	Rancangan Agenda Kegiatan Nasional/Regional TA. 2011 Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	57
Lampiran 2	:	Contoh Formulir A, B dan C Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian.....	64
Lampiran 3	:	Contoh Formulir/Tabel SIMONEV (Versi Tahun 2011)	73
Lampiran 4	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.....	84
Lampiran 5	:	Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	86

Lampiran 6 :	Rincian Indikator, Output dan Komponen Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	94
Lampiran 7 :	Rincian Indikator, Output dan Komponen Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan	96
Lampiran 8 :	Rincian Indikator, Output dan Komponen Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	98
Lampiran 9 :	Rincian Indikator, Output dan Komponen Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	101
Lampiran 10 :	Rincian Indikator, Output dan Komponen Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	104
Lampiran 11 :	Rincian Indikator, Output dan Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor hortikultura, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan hortikultura juga meningkatkan nilai dan volume perdagangan internasional atas produk hortikultura nasional dan ketersediaan sumber pangan masyarakat. Kontribusi sub sektor hortikultura ke depan akan dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Hortikultura, bersinergi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada Pola Pangan Harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen produk hortikultura yang dihasilkan petani, merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan.

Komoditas hortikultura juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional, pasar *modern*, maupun pasar luar negeri (ekspor).

Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan tunai bagi masyarakat dan petani skala kecil, menengah dan besar dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi, jenisnya beragam, tersedianya sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Produk hortikultura dalam negeri saat ini telah mampu memasok kebutuhan konsumen dalam negeri melalui pasar tradisional dan pasar modern serta pasar luar negeri.

Ketersediaan sumberdaya hayati yang berupa jenis tanaman dan varietas yang banyak dan ketersediaan sumberdaya lahan, apabila dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Kondisi

ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pembangunan subsektor hortikultura. Beberapa permasalahan masih dihadapi oleh pelaku usaha hortikultura diantaranya rendahnya produktivitas, lokasi yang terpencar, skala usaha sempit dan belum efisien, Kebijakan dan regulasi dibidang perbankan, transportasi, ekspor dan impor belum sepenuhnya mendukung pelaku agribisnis hortikultura nasional. Hal ini menyebabkan produk hortikultura nasional kurang mampu bersaing dengan produk hortikultura yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu untuk meningkatkan kontribusi sub sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak secara terintegrasi sesuai tugas dan fungsinya.

Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran kinerja subsektor hortikultura dan untuk menselaraskan antara rancangan program dengan pelaksanaan

kegiatan di lapangan serta untuk mengurangi terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang semula sudah tersusun, diperlukan suatu acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura Tahun 2011 adalah:

1. Memberikan acuan bagi penyusunan kegiatan pengembangan hortikultura yang berbasis kinerja.
2. Meningkatkan pemahaman para pelaksana kegiatan dalam menyusun kegiatan dan anggaran kinerja sub sektor hortikultura.
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hortikultura .
4. Menjabarkan program pembangunan hortikultura ke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggaran kinerja, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban dan transparansi serta tanggung jawab sehingga memudahkan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sub sektor hortikultura.

Sasaran yang ingin dicapai dari buku Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura Tahun 2011 adalah:

1. Tersusunnya perencanaan kegiatan pelaksanaan anggaran kinerja pembangunan sub sektor hortikultura sebagai implementasi kebijakan dan program pembangunan sub sektor hortikultura.
2. Terincinya program pembangunan sub sektor hortikultura ke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggaran kinerja pembangunan sub sektor hortikultura, baik di pusat maupun daerah.
3. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sub sektor hortikultura.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura Tahun 2011 meliputi:

1. Sasaran, Program, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2011
2. Rincian Kegiatan Pengembangan Hortikultura Tahun 2011
3. Struktur Pengelolaan Anggaran Ditjen Hortikultura Tahun 2011

4. Pengelolaan Dana Bansos untuk Pengembangan Hortikultura Tahun 2011
5. Sistem Pelaporan Keuangan dan Perlengkapan
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

BAB II

SASARAN, PROGRAM, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN 2011

A. Sasaran

Sesuai dengan nafas pembangunan yang dinamis, pada saat ini peran pemerintah akan fokus sebagai fasilitator dan dinamisator, dan lebih mendorong peranan swasta dan masyarakat. Sinergi pemerintah dan swasta serta masyarakat akan menghasilkan kinerja berupa peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura di dalam negeri yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan yang pada gilirannya, melalui sinergi seluruh jajaran pemerintah, akan dicapai tingkat pendapatan yang semakin hari semakin baik, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah di sub sektor hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura mengalokasikan sejumlah anggaran melalui pola dekonsentrasi bagi Dinas Pertanian Provinsi beserta UPT nya dan dana tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota. Dana APBN tahun 2011 yang sangat terbatas tersebut, harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas agar sasaran pengembangan hortikultura tahun 2011 dapat dicapai.

Adapun sasaran program pengembangan hortikultura tahun 2011 adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan. Sedangkan sasaran kegiatan per eselon II lingkup Ditjen Hortikultura adalah :

1. Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah.
2. Meningkatnya kualitas kawasan dan mutu pengelolaan unit usaha tanaman florikultura
3. Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat.
4. Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura.
5. Terkelolanya serangan OPT dalam pengamanan produksi hortikultura dan terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor hortikultura.
6. Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura.

Secara rinci target produksi dan kinerja pengembangan hortikultura disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Target Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi Hortikultura Tahun 2011

No	Uraian	Produksi	Laju Pertumbuhan (%)
I	Buah		
	- Buah Tahunan dan Perdu (Ton)	10.010.038	4,82
	- Buah Semusim dan Merambat (Ton)	862.467	5,90
	- Buah Terna (Ton)	8.715.773	2,67
II	Sayuran		
	- Sayuran Umbi (Ton)	2.530.697	2,75
	- Sayuran Daun (Ton)	3.275.218	2,78
	- Sayuran Buah (Ton)	5.093.775	3,70
III	Florikultura		
	- Tanaman Bunga/ Daun Potong (Tangkai)	270.770.892	9,15
	- Tanaman Pot dan Tan.Lansekap (Pohon)	12.809.235	5,14
	- Tanaman Bunga Tabur (Kg)	27.364.964	9,59
IV	Tanaman Obat		
	- Tanaman Obat Rimpang (Kg)	433.872.743	3,82
	- Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)	72.532.716	3,58
	- Jamur (Kg)	55.101.000	8,98

Tabel 2. Target Kinerja Pengembangan Hortikultura Tahun 2011

No	Kegiatan/Indikator	Target 2011
I.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	
	A. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Ha)	5.778
	B. Pengembangan Registrasi Kebun Tanaman Buah (Kebun)	720
	C. Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Klp)	279
	D. Perbaikan Mutu Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)	84.156
	E. Pengembangan Registrasi Packing House (packing house)	10
	F. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Buah (Lembaga)	304

No	Kegiatan/Indikator	Target 2011
II.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan	
	A. Pengembangan Kawasan Florikultura (Kecamatan)	283
	B. Pengembangan Registrasi Unit Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha)	62
	C. Perbaikan Mutu Pengelolaan Unit Usaha Tanaman Florikultura (Klp)	367
	D. Perbaikan Mutu Pengelolaan Pascapanen Florikultura (unit)	101
	E. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura (Lembaga)	79
III.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	
	A. Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Ha)	785
	B. Pengembangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Lahan Usaha)	1.000
	C. Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Klp)	250
	D. Perbaikan Mutu Pengelolaan Pascapanen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (unit)	265
	E. Pengembangan Registrasi Packing House (packing house)	20
	F. Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Lembaga)	525
IV.	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	
	A. Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)	1.688.000
	B. Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih)	125.604.000
	C. Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (Kg)	14.190
	D. Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Buah Bermutu (Batang)	1.167.000
	E. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan Hortikultura (unit)	114
	F. Peningkatan Kapasitas Lab Perbenihan Hortikultura (unit)	34

No	Kegiatan/Indikator	Target 2011
V.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura.	
	A. Peningkatan pengelolaan OPT (kali)	1.438
	B. Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	47
	C. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura (unit)	36
	D. Peningkatan Kapasitas Lab. Perlindungan Tanaman Hortikultura. (laboratorium)	90
	E. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis SPS mendukung Ekspor Produk Hortikultura (Draft Pest List)	12
	F. Pengembangan SLPHT (Klp)	396
VI.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	
	A. Pelayanan Manajemen (Bulan)	12
	B. Pengelolaan Laporan (Laporan)	209
	C. Pengelolaan Dokumen (Dokumen)	7
	D. Pemberdayaan LM3 (Lembaga)	200
	E. Pemberdayaan Konsorsium Hortikultura (Lembaga)	20

B. Program Pengembangan Hortikultura

Sesuai dengan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu "Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan"

Secara ringkas program dan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2011

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA
018.04.07	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
1769	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.
1770	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan.
1771	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan.
1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
1773	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
1774	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura

Terkait dengan reformasi perencanaan dan penganggaran diatas maka untuk tahun anggaran 2011, Direktorat Jenderal Hortikultura hanya mempunyai 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan manajemen administrasi dan keuangan.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan hortikultura mengacu pada arah kebijakan pengembangan pertanian yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hortikultura melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pascapanen hortikultura.
3. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar, penataan BF dan BPMT, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura
4. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri perbenihan
5. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.

6. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta pengolahan hasil;
7. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
8. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3, PMD.
9. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
10. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait.
11. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO.

12. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agen hayati, mitigasi dampak iklim.
13. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional melalui konservasi, domestikasi dan komersialisasi. Penanganan pascapanen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
14. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional.
15. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis hortikultura.
16. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura.
17. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.

D. Strategi

Strategi pengembangan hortikultura sejalan dengan Strategi pembangunan pertanian selama 2010-2014 berupa **TUJUH GEMA REVITALISASI** yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu:

1. Revitalisasi Lahan;

- a. penetapan penggunaan lahan melalui pewilayahan komoditas hortikultura sesuai dengan RUTR;
- b. menurunkan budidaya dataran tinggi ke dataran medium;
- c. mengurangi budidaya hortikultura di kemiringan tertentu;
- d. pengembangan hortikultura di dataran rendah;
- e. pengembangan DAS;
- f. meningkatkan penggunaan sarana organik.

2. Revitalisasi Perbenihan;

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem, standarisasi proses dan akreditasi, peran dan fungsi, penguatan teknologi sistem informasi, pendele-gasian kewenangan indeksing;

- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan perkumpulan penangkar, kemudahan akses Iptek, pasar dan modal, pengembangan dan penerapan SOP perbenihan;
- c. Penataan BF dan BPMT melalui pengembangan sarana dan prasarana, penyediaan pohon induk;
- d. penguatan fungsi LSSM, Balai Benih, Kelembagaan Pengujian Mutu, Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, penguatan kelembagaan penangkar/produsen benih, kelembagaan BF dan BPMT;
- e. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal melalui eksplorasi, determinasi dan domestikasi, duplikat pohon induk, Pohon Induk Tunggal (PIT);
- f. Peningkatkan peran tenaga pengawas benih tanaman dan PPNS melalui pelatihan, fasilitasi sarana dan prasarana;
- g. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan dalam negeri melalui kemudahan perijinan, pembinaan proses akreditasi, penyederhaan regulasi dan pelepasan varietas (peluncuran).

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

- a. Penyediaan infrastruktur kebun dan budidaya meliputi rumah lindung, mulsa plastik, kubung jamur, kelambu dan

infrastruktur pascapanen meliputi : bangsal pascapanen, gudang penyimpanan melalui penataan rantai pasok;

- b. Penyediaan sarana budidaya dan pascapanen meliputi mulsa plastik, sarana pengendali OPT, alat pengolah tanah, peralatan panen dan pascapanen;
- c. Mengembangkan percontohan infrastruktur kebun-kebun hortikultura;
- d. Mendorong pembangunan infrastruktur kebun khususnya jalan usaha tani, jaringan irigasi dan sumber energi.

4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

- a. Pelaksanaan sekolah lapang untuk menerapkan PHT, GAP, GHP dan SOP budidaya dan pascapanen hortikultura;
- b. Pelaksanaan magang dan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk petani di daerah sedang berkembang ke kawasan hortikultura yang sudah maju;
- c. Pengembangan pola pendampingan yang dilakukan oleh petugas lapang/champion/akademisi/petani maju/peneliti dalam hal pengembangan bisnis hortikultura;

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani

- a. Mengkonsolidasikan berbagai sumber pembiayaan seperti BUMN, BUMD, dan lembaga perbankan serta lembaga pembiayaan lainnya untuk dapat menyalurkan sumber

pembiayaan yang dimiliki bagi pengembangan kawasan hortikultura;

- b. Mendorong mitra usaha sebagai penjamin kredit atau avalis;
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD bagi pengembangan hortikultura;
- d. Memfasilitasi dana bantuan sosial melalui PUAP, LM3, PMD dan bansos lainnya.

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani

- a. Memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok tani, gapoktan, asosiasi, perhimpunan, lembaga pengembangan hortikultura;
- b. Mengembangkan wadah bagi masyarakat, praktisi, pakar dan pemerintah dalam bentuk Konsorsium untuk pengembangan industri hortikultura;
- c. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta pengolahan hasil.

7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

- a. Memperkuat hubungan peneliti dengan penyuluh dalam memperlancar diseminasi teknologi maju antara lain kultur

jaringan/somatik embrio genetik, rekayasa genetik, nano teknologi;

- b. Mengembangkan perekayasaan sosial seperti SLPAH (sekolah lapang pengembangan agribisnis hortikultura) dalam diseminasi teknologi untuk pengembangan kawasan terintegrasi;
- c. Mendorong penerapan teknologi pengolahan hasil untuk pengembangan industri perdesaan berbasis hortikultura;
- d. Memfasilitasi penerapan teknologi pascapanen antara lain: perpanjangan masa simpan, warna, pengelolaan OPT pascapanen.

BAB III

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN 2011

Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi saja tetapi juga terkait dengan isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas lagi. Sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung pembangunan hortikultura, pada tahun anggaran 2011 telah dialokasi dana pembangunan yang dituangkan ke dalam 6 kegiatan yang dinaungi oleh 1 (satu) program utama dengan rincian sebagai berikut:

A. Program

Dalam rangka melaksanakan reformasi perencanaan dan anggaran maka program di Direktorat Jenderal Hortikultura adalah : Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan (Kode 018.04.07)

B. Kegiatan

Adapun kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sejumlah Eselon II di lingkup Ditjen Hortikultura. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Kode 1769)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pengembangan kawasan tanaman buah, pengembangan registrasi kebun, perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah, pengembangan registrasi *packing house* dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah.

Indikator keluarannya adalah 1) Pengembangan kawasan tanaman buah, 2) Pengembangan registrasi kebun tanaman buah, 3) Perbaikan mutu pengelolaan kebun, 4) Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah, 5) Pengembangan registrasi *packing house*, 6) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah dan 7) Peningkatan Mutu Pembinaan untuk Kegiatan Pengembangan Produksi Buah.

Rincian indikator keluaran dan output pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan sebagaimana pada Lampiran 6.

2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan (Kode 1770)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pengutuhan kawasan tanaman florikultura, pengembangan registrasi unit usaha, perbaikan mutu pengelolaan unit usaha, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura, dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman florikultura.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya kualitas kawasan dan mutu pengelolaan unit usaha tanaman florikultura.

Indikator keluarannya adalah 1) Pengutuhan kawasan tanaman florikultura, 2) Pengembangan registrasi unit usaha tanaman florikultura, 3) Perbaikan mutu pengelolaan unit usaha tanaman florikultura, 4) Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura, 5) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman hortikultura, 6) Peningkatan Mutu Pembinaan untuk Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Florikultura.

Rincian indikator keluaran dan output pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan sebagaimana pada Lampiran 7.

3. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan (Kode 1771)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat, pengembangan registrasi, perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat, pengembangan registrasi *packing house* dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat.

Indikator keluarannya adalah 1) Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat , 2) Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan obat, 3) Perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat, 4) Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat, 5) Pengembangan registrasi *packing house*, 6) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha, 7) Peningkatan Mutu Pembinaan untuk Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat.

Rincian indikator keluaran dan output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan sebagaimana pada Lampiran 8.

4. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura (Kode 1772)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu, benih tanaman florikultura bermutu, benih tanaman obat bermutu, benih tanaman buah bermutu, peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan hortikultura dan peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah : berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura.

Indikator keluarannya adalah 1) Peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu, 2) Peningkatan ketersediaan benih tanaman florikultura bermutu, 3) Peningkatan ketersediaan benih tanaman obat bermutu, 4) Peningkatan ketersediaan benih tanaman buah bermutu, 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan hortikultura, 6) Peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan hortikultura, 7) Peningkatan Mutu Pembinaan untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.

Rincian indikator keluaran dan output kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura sebagaimana pada Lampiran 9.

5. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura (Kode 1773)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan pengelolaan OPT, pengelolaan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura, peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura, peningkatan pemenuhan persyaratan teknis SPS mendukung ekspor produk hortikultura dan pengembangan SLPHT.

Sasaran kegiatan adalah : terkelolanya serangan OPT dalam pengamanan produksi hortikultura dan terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor produk hortikultura.

Indikator keluarannya adalah 1) Peningkatan pengelolaan OPT, 2) Pengelolaan dampak perubahan iklim, 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura, 4) Peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura, 5) Peningkatan pemenuhan persyaratan teknis SPS mendukung ekspor produk hortikultura, 6) Pengembangan SLPHT, 7) Peningkatan Mutu Pembinaan untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura.

Rincian indikator keluaran dan output Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura sebagaimana pada Lampiran 10.

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura (Kode 1774)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pelayanan manajemen, pengelolaan laporan, pengelolaan dokumen, pemberdayaan LM3 dan pemberdayaan konsorsium hortikultura.

Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura

Indikator keluarannya adalah 1) Pelayanan manajemen 2) Pengelolaan laporan 3) Pengelolaan dokumen, 4) Pemberdayaan LM3, 5) Pemberdayaan konsorsium.

Rincian indikator keluaran dan output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana pada Lampiran 11.

BAB IV

STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULURA TAHUN 2011

APBN Tahun Anggaran 2011 merupakan tahun ke tujuh dari pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (*unified budget*) dan berbasis kinerja (*performance budget*). Implementasi anggaran terpadu berbasis kinerja dimaksud harus didasarkan pada capaian indikator kinerja sehingga program pembangunan hortikultura dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kegiatan pembangunan hortikultura di daerah di stimulasi oleh dana APBN yang dibagi ke dalam dua pola yaitu pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan.

Adapun struktur anggaran berdasarkan kegiatan dari kedua pola anggaran di atas adalah sebagai berikut :

Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi tanaman hortikultura tingkat provinsi, BPSBTPH dan BPTPH, sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2011 dilaksanakan oleh 97 satker (33 satker Dinas provinsi, 32 satker UPTD BPSBTPH dan 32 satker UPTD BPTPH).

Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi tanaman hortikultura tingkat kabupaten/kota. Anggaran tugas pembantuan untuk tahun 2011 dilaksanakan oleh 131 Satuan Kerja (Satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TAHUN 2011

A. Kegiatan yang dibiayai dana Bantuan Sosial (Bansos)

Dana bantuan sosial untuk pengembangan hortikultura berupa transfer dana dari kas negara ke rekening kelompok tani. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi Pembina Gapoktan. Adapun kegiatan yang mendapatkan alokasi dana bantuan sosial sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

- a. Pengembangan Kawasan Buah
- b. Fasilitasi Sarana Pascapanen Buah
- c. Inisiasi Pengembangan Kawasan Buah
- d. Pengembangan Kawasan pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan

- a. Pengadaan Sarana Prasarana Mendukung Peningkatan Mutu Tanaman Florikultura
- b. Fasilitasi Pengembangan Florikultura
- c. Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Florikultura Mendukung Peningkatan Mutu
- d. Inisiasi Pengembangan Pengembangan Tanaman Florikultura

- e. Apresiasi Bagi Pemenang Lomba
- f. Fasilitasi Asosiasi Pembina

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

- a. Pengembangan Hortikultura Berkelanjutan
- b. Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana
- d. Pengembangan Kawasan Inisiasi Sayuran dan Biofarmaka
- e. Fasilitasi Sarana Pascapanen Sayuran dan Biofarmaka

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

- a. Pemberian Penghargaan
- b. Pengembangan Hortikultura Melalui LM3
- c. Pengembangan Hortikultura Melalui PMD

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang akan mendapatkan dana bantuan sosial merupakan kelompok yang sudah ada/eksis dan mempunyai aktivitas dalam pengembangan usaha hortikultura dengan prioritas pada kelompok yang mengalami kendala dalam mengakses sumber permodalan.

Proses seleksi kelompok sasaran dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota yang dilakukan secara terbuka sesuai hasil identifikasi di lapangan.

C. Kriteria dan persyaratan Teknis Calon Kelompok Sasaran

Kriteria Umum calon kelompok sasaran antara lain :

1. Kelompok yang sudah aktif dan bukan bentukan baru.
2. Mempunyai jumlah anggota minimal 10 orang
3. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal atau fasilitasi lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau tahun sebelumnya, kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan untuk pengutuhan pengembangan kawasan hortikultura.
4. Kelompok bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
5. Anggota kelompok merupakan pelaku usaha atau anggota masyarakat yang berpotensi sebagai penggerak usaha agribisnis hortikultura.
6. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi

Persyaratan teknis penerima bantuan sosial untuk pengembangan hortikultura sebagai berikut :

1. Berkelompok atau sedang dalam proses membentuk suatu Gapoktan/Asosiasi.
2. Mempunyai anggota yang memiliki lahan usaha sesuai peruntukannya guna pengembangan budidaya hortikultura.

3. Mampu dan mau menerapkan GAP/SOP, PHT dan Adopsi Teknologi.
4. Mempunyai kepedulian untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura.
5. Memiliki keterbatasan modal usaha.
6. Mempunyai target untuk pengembangan usaha.
7. Mempunyai jaringan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha/rantai pasok.
8. Memiliki struktur dan rencana kerja kelompok yang jelas dan melaksanakan rencana kerja secara konsisten.

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Pengembangan Hortikultura Tahun 2011 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011.

BAB VI

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan Undang-undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintahan Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sedangkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAKBMN) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara.

Disamping mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/barang yang berada dalam tanggung jawabnya, Menteri/Pimpinan Lembaga juga melaporkan penggunaan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan kepada daerah dan/atau desa. Gubernur, bupati atau walikota mengusulkan daftar SKPD yang akan mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana Dekonsentrasi kepada Kementerian Negara/Lembaga melalui Gubernur.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi sesuai dengan hirarki organisasi, baik untuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan maupun pengelolaan barang. Unit akuntansi pengelolaan keuangan/barang terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)

UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B) – EI)

UAPPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I penanggungjawabnya adalah Pejabat Eselon I.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B – W)

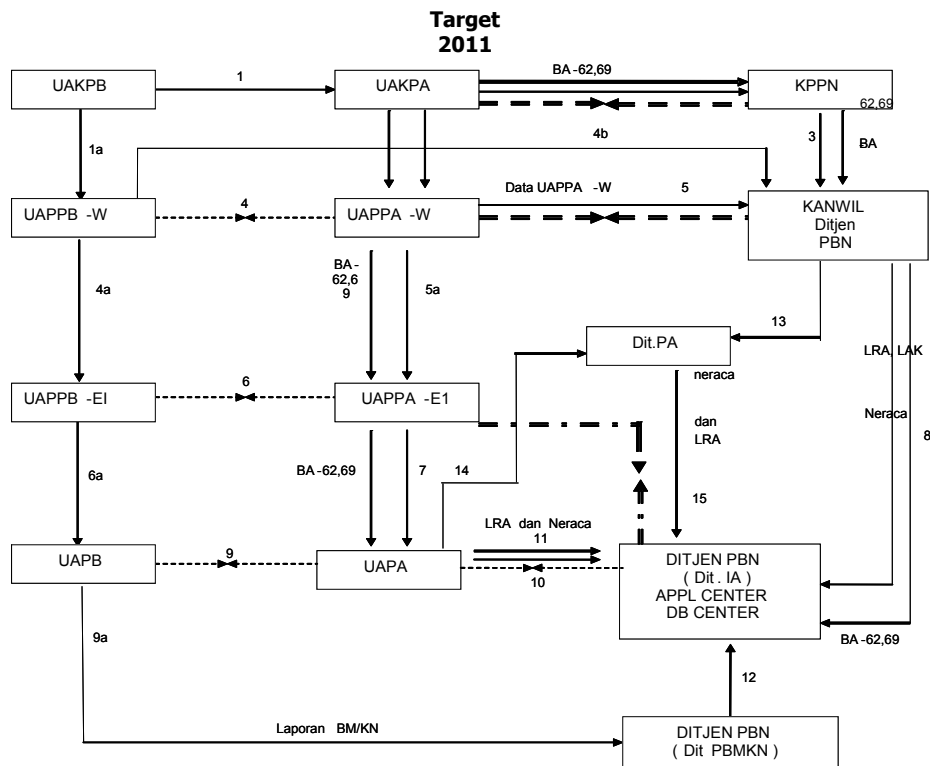
UAPPA/B – W merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat Kantor Wilayah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W, untuk UAPPA/B – W Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk UAPPA/B – W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Bupati atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga.

Dalam hal ini untuk Kementerian Pertanian BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) ditunjuk sebagai sekretariat wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan OT.140/9/2008. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UAPPA/B-W maka ditetapkan organisasi dan tata kerja yang dalam pelaksanaan kegiatan laporan keuangan tersebut menerima dari seluruh dana dari bagian anggaran (BA) 018 (Kementerian Pertanian), BA 999 (Belanja ALin-lain)

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) yang memiliki wewenang menguasai anggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA/B adalah kepala satuan kerja. Untuk UAKPA/B Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan penanggung-jawabnya adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi

Keterangan :

- : arus data laporan (termasuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan)
- : arus LPJ APP
- : rekonsiliasi data

- > <-- : pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan
—————> : arus laporan APP

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) baik di Pusat maupun Daerah diperlukan adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan/ barang yang meliputi :

Pusat :

Melaksanakan *workshop* SAI pada tingkat regional untuk membahas perkembangan laporan SAI Pengembangan Agribisnis Hortikultura, dan menyusun laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Provinsi :

- 1) Menyusun laporan keuangan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik Negara.
- 2) Melakukan koordinasi dengan petugas SAK dan SIMAKBMN di tingkat pusat untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Eselon I.

- 3) Melakukan kompilasi merekapitulasi dan evaluasi laporan SAK dan SIMAKBMN baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten / kota kemudian mengirim ke pusat.

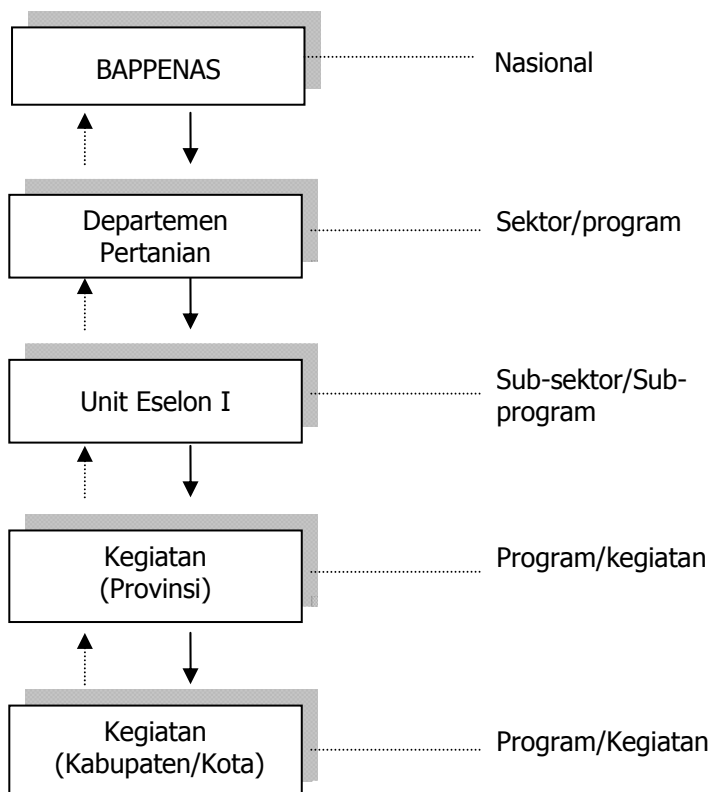
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

A. Monitoring dan Evaluasi

Prosedur monitoring dan evaluasi mengacu pada hirarki sistem Monev, dimana hirarki yang lebih tinggi melakukan monitoring dan evaluasi kepada hirarki di bawahnya secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan, mengamati permasalahan dan hambatan yang dihadapi, juga dalam rangka menyatukan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Hirarki sistem monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.



Keterangan : —————> = Monev > = Laporan

Gambar 3. Hirarki Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan program lingkup Ditjen Hortikultura, monitoring dan evaluasi punya peranan penting antara lain: 1) memberikan informasi dan gambaran keberhasilan/ kegagalan

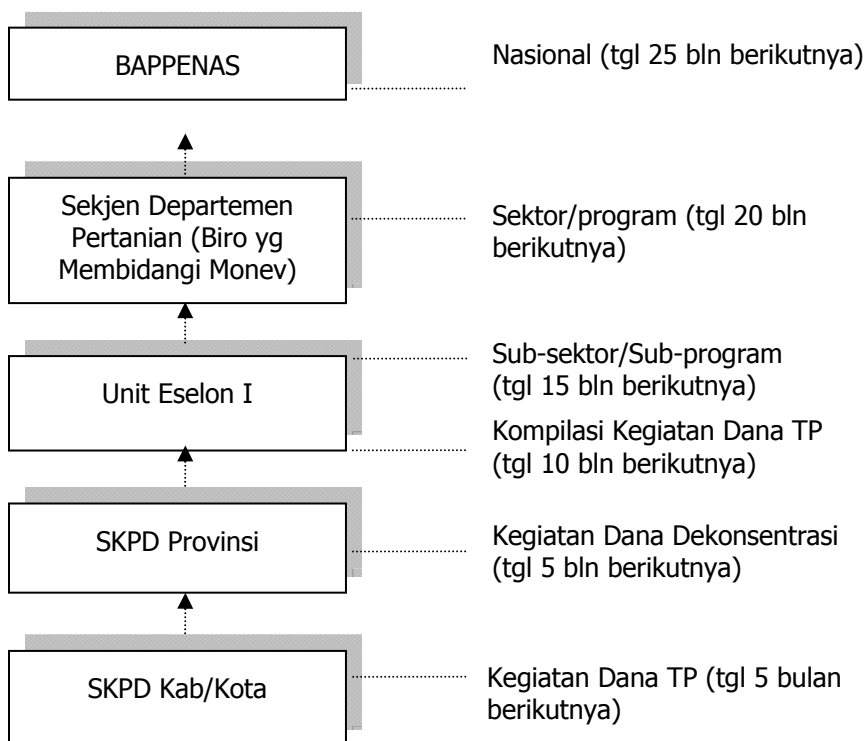
dan kinerja program dan institusi, 2) bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, 3) bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan, 4) sebagai bahan referensi untuk perbaikan, tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan, 5) sebagai referensi pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).

Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan monitoring dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui : 1). Pencapaian kinerja, 2). *Output, outcome* dan keberhasilan program dan kegiatan, 3). Gambaran potensi pengembangan, dan 4). Permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil monitoring dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi.

Pelaksana kegiatan juga diwajibkan menyusun laporan sesuai SK Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.

120/KET/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan dan laporan insidentil bilamana diperlukan. Jadwal penyampaian laporan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hirarki dan Jadwal Penyampaian Laporan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh petugas pusat ke daerah (terutama pemantapan pelaksanaan kegiatan dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) dilakukan secara intensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah binaannya, serta menyampaikan laporannya.

B. Pelaporan SIMONEV

Dalam melaksanakan program pengembangan agribisnis hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura secara berkala harus menyampaikan laporan perkembangan, kinerja keberhasilan, masalah dan hambatan ke Menteri Pertanian, Presiden, DPR dan Publik. Oleh karena itu, penyiapan laporan perkembangan kegiatan dan kinerja pelaksanaan program pengembangan agribisnis hortikultura harus dilakukan secara berkala dengan konsisten. Pelaporan hasil kegiatan program dan anggaran kinerja ini, merupakan suatu bentuk penyampaian informasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan itu juga akan dapat dilihat sejauhmana tingkat keberhasilannya.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No: 31/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Pertanian. Hal ini dirumuskan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selanjutnya dalam pelimpahan pengelolaan anggaran dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan ke gubernur, bupati dan walikota, masalah ini juga ditegaskan lagi.

Oleh karena itu penyampaian laporan harus menjadi perhatian serius bagi satker pengelola anggaran pembangunan hortikultura di daerah. Berdasarkan Surat Edaran (SE) tersebut maka tata cara, waktu dan format pelaporan kinerja kegiatan APBN diatur sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dengan menggunakan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian (termasuk hortikultura) dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama, dengan menggunakan **Formulir A** sebagaimana yang terdapat dalam lampiran PP RI No 39 tahun 2006 yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggunakan aplikasi *software* **SIMONEV**, dan menyampaikan copy file data ke Eselon I terkait (dalam hal ini Ditjen Hortikultura). Laporan disusun **setiap bulan** dan disampaikan **paling lambat tanggal 5 (lima)** bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

2. Kepala SKPD Provinsi dengan menggunakan data SP2D menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian (termasuk Hortikultura) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Eselon I terkait dengan menggunakan **Formulir A** sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI No 39 Tahun 2006, yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggunakan aplikasi *software* **SIMONEV**, dan menyampaikan copy file data ke Eselon I terkait. Laporan disusun **setiap bulan** dan disampaikan **paling lambat tanggal 5 (lima)** bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
3. Kepala SKPD Provinsi disamping menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian (termasuk Hortikultura) sebagaimana diatur dalam butir (2) diatas juga menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN Pembangunan Pertanian dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota setelah menerima laporan dari kabupaten/kota di lingkup provinsi sebagaimana diatur dalam butir(1). Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Eselon I terkait dengan menggunakan **Formulir B** sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI No 39 tahun 2006.

4. Kepala unit kerja pusat (Eselon II dan unit kerja pusat di daerah) berdasarkan SP2D menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dalam rangka pelaksanaan pengelolaan APBN dan kegiatan di daerah sesuai tugas dan fungsi binaan masing-masing kepada Eselon I dengan menggunakan formulir A sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI. No. 39 tahun 2006 yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan menggunakan aplikasi *software* Simonev, dan menyampaikan *copy file* data. Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
5. Kepala unit organisasi (Eselon I) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana APBN masing-masing Eselon I kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal dengan menggunakan **Formulir B** sebagaimana yang terdapat pada lampiran PP RI No 39 tahun 2006, dengan aplikasi *software* SIMONEV. Laporan disusun berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada butir (3). Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir bulan yang bersangkutan dengan menyertakan *copy file* data aplikasi simonev.

6. Menteri Pertanian akan menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja Pembangunan Pertanian kepada Menteri Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, disusun setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, setelah menerima laporan Kinerja Pembangunan Pertanian dari Eselon I lingkup Departemen Pertanian sebagaimana diatur pada butir (5).

Dalam upaya memudahkan pengisian dan penyampaian laporan, serta mengakomodir beberapa informasi yang diperlukan, maka Biro Perencanaan dan PUSDATIN setiap tahunnya melakukan revisi dan penyempurnaan Format SIMONEV DEPTAN, namun tetap mengacu kepada SE Sekjen 484 / 2007 tersebut.

C. Kegiatan-Kegiatan MONEV Dan Pelaporan

Setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang penugasan pengelolaan dan tanggung jawab Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan kepada gubernur, maupun Dana Tugas Pembantuan kepada bupati, walikota (seperti Permentan No. 02, 03 dan 04 tahun 2008) disebutkan bahwa SKPD perlu membuat pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mencakup aspek

manajerial dan aspek akuntabilitas. Laporan aspek manajerial tersebut dibuat dan disampaikan melalui Laporan SIMONEV.

Kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan dan dialokasikan dananya dalam rangka MONEV baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten / kota adalah sebagai berikut :

Pusat :

- 1) Melaksanakan pertemuan sosialisasi SIMONEV dengan mengundang petugas pelaporan SIMONEV di tingkat provinsi dan petugas Direktorat Jenderal Hortikultura (Pusat). Sosialisasi dilakukan terhadap *software* SIMONEV yang dipersiapkan oleh PUSDATIN dan Biro Perencanaan Departemen Pertanian. Formulir A, B, dan C yang digunakan pada pelaporan ini sebagaimana dikemukakan pada lampiran 1 – 2.
- 2) Mengembangkan dan menyempurnakan SIMONEV berdasarkan perkembangan/perubahan dalam perencanaan anggaran, struktur RKA-KL, sehingga dapat dan mudah diaplikasikan (bersama PUSDATIN, Biro Perencanaan dan semua Eselon I pelaksana program).
- 3) Melaksanakan kompilasi, evaluasi dan analisis data/informasi hasil pelaporan SIMONEV dan capaian kegiatan dari satker pusat dan daerah. Selanjutnya membuat laporan konsolidasi tingkat Ditjen Hortikultura untuk disampaikan ke hirarki lebih lanjut.

Provinsi :

- 1) Menghadiri undangan sosialisasi *software* SIMONEV yang diadakan oleh pusat.
- 2) Melaksanakan sosialisasi SIMONEV tingkat Kabupaten / Kota dengan mengundang petugas pelaporan SIMONEV di tingkat Kabupaten / Kota.
- 3) Melakukan kompilasi merekapitulasi dan evaluasi laporan SIMONEV baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota kemudian mengirim ke pusat.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan hortikultura pada setiap satker.

Kabupaten :

- 1) Menghadiri sosialisasi penggunaan *software* SIMONEV di provinsi, sehingga dapat dimengerti dan diaplikasikan.
- 2) Membuat dan mengirim laporan SIMONEV secara periodik dan tepat waktu ke provinsi dan ditembuskan ke pusat.

Software SIMONEV ditetapkan bersama antara PUSDATIN dan Biro Perencanaan Departemen Pertanian dan dibahas bersama dengan unit kerja pengelola pelaporan. Selanjutnya dilakukan pelatihan (TOT) kepada petugas pengelola pelaporan dari masing-masing unit eselon I. Setiap tahun dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SIMONEV mengikuti dan mengakomodir

perubahan pada perencanaan dan perubahan struktur RKA-KL. Sebelum *software* SIMONEV baru (revisi) dirumuskan, maka format pelaporan masih tetap menggunakan format lama yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tetap dilaporkan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengiriman laporan SIMONEV dilakukan secara konvensional (melalui surat) ataupun melalui email ke alamat ; simonevhorti@deptan.go.id. Contoh pelaporan SIMONEV versi 2010 dikemukakan pada Lampiran 2.

BAB VIII PENUTUP

Komoditas hortikultura diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi regional yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku bisnis. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman yang sama tidak hanya pada aparat pertanian, akan tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Persepsi ini sangat penting untuk dijadikan landasan dalam memotivasi unsur pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan secara serius upaya pembangunan hortikultura melalui penerapan enam pilar pengembangan hortikultura.

Program dan strategi kebijakan pembangunan hortikultura harus dapat dijadikan sarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi, sinergisme dan sinkronisasi antar sektor dan sub sektor serta pemangku kepentingan lainnya.

Lampiran 1.

Rancangan Agenda Kegiatan Nasional/ Regional Tahun 2011 Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1	Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura 2011	Kadis, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala BPTPH, Kepala BPSBTPH, Kepala BBH Seluruh Indonesia (Dinas Pertanian Provinsi, BPSB, BPTPH)	Sumatera Utara	Februari
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Hortikultura 2012	Kepala Bidang Hortikultura, Kepala BPTPH, Kepala BPSBTPH, dan Kepala Bidang Program Seluruh Indonesia (Dinas Pertanian Provinsi, BPSB, BPTPH)	Kalimantan Barat	Juni
3	Workshop Pemantapan RKA-KL Subsektor Hortikultura 2012 Hortikultura 2011	Kepala BPTPH, Kepala BPSBTPH, Kepala Bidang Program Seluruh Indonesia dan Operator RKA-KL (Dinas Pertanian Provinsi, BPSB, BPTPH)	Jawa Timur	Oktober
4	Koordinasi Program Pengembangan Hortikultura dengan Substistem Pendukung Wilayah Barat	Dinas Pertanian Propinsi / Kabisid Produksi yang menangani hortikultura Propinsi di wilayah barat (Aceh, Bengkulu, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Sumut, Lampung, Sumsel, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat), Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota wilayah barat, Kepala bagian perencanaan (Badan Litbang, Prasarana dan Sarana Pertanian, dan PPHP)	Sumatera Selatan	April
5	Koordinasi Program Pengembangan Hortikultura dengan Substistem Pendukung Wilayah Timur	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura Provinsi di wilayah timur (Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Sulteng, Sultra, Sulbar, Sulut, Papua, Papua Barat), Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota di wilayah timur, Kepala bagian perencanaan (Badan Litbang, Prasarana dan Sarana Pertanian, dan PPHP)	Nusa Tenggara Barat	Mei
6	Sinkronisasi Angka Sementara Hortikultura Tahun 2010	Pejabat/ Petugas yang menangani data hortikultura seluruh Indonesia (Dinas Pertanian Provinsi, BPS Propinsi)	Sumatera Selatan	Maret
7	Sinkronisasi Angka Tetap Hortikultura Tahun 2010	Pejabat/ Petugas yang menangani data hortikultura seluruh Indonesia (Dinas Pertanian Provinsi, BPS Propinsi)	Sulawesi Utara	Juni
8	Sosialisasi penyelesaian tindak lanjut LHP	Dinas Pertanian Provinsi/Petugas yang menangani LHP di Provinsi	Solo- Jateng	Mei
9	Sosialisasi SIMONEV Hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ petugas yang menangani SIMONEV di Provinsi	Yogyakarta	April
10	Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern	Dinas Pertanian Provinsi/Kepala Bidang yang menangani hortikultura	Bogor-Jabar	Juni
11	Apresiasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Saterker Lingkup Ditjen Hortikultura	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Saterker Penerima Dana Dekonsentrasi Hortikultura Tahun 2011 seluruh Indonesia	Bali	Juni
12	Workshop Penyusunan Laporan SAI dan SABMN tahun 2011 Semester I	Dinas Pertanian Provinsi/Petugas yang menangani SAI dan SABMN di Provinsi	Jogjakarta	Juli

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
13	Workshop Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Semester II	Dinas Pertanian Provinsi/Petugas yang menangani SAI dan SABMN di Provinsi	Jawa Timur	Desember
14	Penyelenggaraan penyusunan peraturan Perundang-undangan tentang Hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ Kepala Bidang yang menangani hortikultura di 33 Provinsi	Jakarta	April, Juni, Agustus
15	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan bidang hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ Kepala Bidang yang menangani hortikultura di 33 Provinsi	Jakarta	Mei, Juli, September
16	Penyelenggaraan harmonisasi peraturan Perundang-undangan bidang hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ Kepala Bidang yang menangani hortikultura di 33 Provinsi	Jakarta	Oktober
17	Penyelenggaraan penyusunan peraturan Permentan bidang Hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ Kepala Bidang yang menangani hortikultura di 33 Provinsi	Jakarta	Januari - Sptember
18	Pembahasan Peraturan Permentan bidang hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ Kepala Bidang yang menangani hortikultura di 33 Provinsi	Jakarta	Januari - Sptember
19	Penyelenggaraan harmonisasi peraturan Permentan bidang hortikultura	Dinas Pertanian Provinsi/ Kepala Bidang yang menangani hortikultura di 33 Provinsi	Jakarta	Oktober - Desember

2. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1	Pertemuan Koordinasi Salak	Dinas Pertanian Provinsi dan Kab./Kota / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura yang mendapatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengembangan Salak	Bali	Juli
2	Pertemuan Koordinasi Manggis	Dinas Pertanian Provinsi dan Kab./Kota / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura yang mendapatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengembangan Manggis	Jawa Timur	Juli
3	ITF 2	Dinas Pertanian Provinsi dan Kab./Kota / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura yang mendapatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengembangan Buah-buahan	Jakarta	November
4	PF2N	Dinas Pertanian Provinsi dan Kab./Kota / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura yang mendapatkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengembangan Buah-buahan	Bali	Juli

3. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1	Koordinasi Penetapan Pola Produksi Sayuran	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbang, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, Bali, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulse, Sulut, Gorontalo	Kaltim	Oktober

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura **2011**

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
2	Evaluasi Penetapan Pola Produksi Sayuran	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbang, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, NTB, Bali, Kaltim, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sulut, Gorontalo,	Sumsel	Februari
3	Festival Jamu	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Aceh, Riau, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Bengkulu, Sultra, Bali, NTB	DIY	Juni
4	Symposium Internasional Temulawak ke-2	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Aceh, Riau, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Bengkulu, Sultra, Bali, NTB	Bogor	Mei
5	Model Pengembangan Pekarangan	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Sulsel, DKI, Banten	Sulsel, DKI, Banten	Agustus
6	PF2N	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di 33 Provinsi (kecuali Maluku)	Bali	Juni
7	Temu Agribisnis Direktorat Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (PENAS)	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di 33 Provinsi (kecuali Maluku)	Kaltim	Juli
8	Festival Jamur	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Lampung, Banten, Aceh, Sumut, DKI, Kalbar	DKI	Juli
9	Pertemuan KASS	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di Provinsi Aceh, Sumut, Sumbang, Sumsel, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Kepri	Sumbang	Mei
10	Gerakan Makan Sayur	Dinas Pertanian Provinsi / Kepala Bidang Produksi yang menangani hortikultura di 33 Provinsi (kecuali, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulteng, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Gorontalo, Sulbar)	Banten/DKI	Oktober

4. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1	Temu Evaluasi Program Pengembangan Tanaman Florikultura	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi Kab/Kota DKI Jakarta; Jawa Barat (Kota Bandung, Bekasi, Bandung, Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung Barat, Kota Depok, Sumedang); Jawa Tengah (Kota Semarang, Magelang, Boyolali, Wonosobo, Karanganyar, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan); DI Yogyakarta (Sleman); Jawa Timur (Malang, Kota Batu, Pasuruan, Gresik); NAD (Aceh Besar); Sumatera Utara (Tanah Karo, Deli Serdang); Sumatera Barat (Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Tanah Datar, Agam, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Solok); Riau (Kampar, Kota Pekanbaru); Jambi; Sumatera Selatan; Lampung (Lampung Barat);	Bali	September

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
		Kalimantan Barat (Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur (Kota Balikpapan); Sulawesi Utara (Kota Tomohon); Sulawesi Tengah (Kota Palu); Sulawesi Selatan (Bantaeng); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari); Bali (Gianyar, Tabanan, Karangasem, Kota Denpasar); Nusa Tenggara Barat; Bengkulu; Banten (Tangerang, Kota Tangerang); Bangka Belitung; Gorontalo; Kepulauan Riau (Bintan).		
2	Workshop Peningkatan Kapasitas Pemandu lapang (PL1, PL2)	PL 1, PL2 Propinsi Kab/Kota DKI Jakarta; Jawa Barat; Jawa Tengah (Kota Semarang, Magelang, Boyolali, Wonosobo, Karanganyar, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan); DI Yogyakarta; Jawa Timur (Malang, Kota Batu, Pasuruan); NAD; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Jambi; Sumatera Selatan; Lampung; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan (Bantaeng); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari); Bali; Nusa Tenggara Barat; Bengkulu; Banten; Bangka Belitung; Gorontalo; Kepulauan Riau.	Jawa Timur	Juli
3	Sosialisasi Faktor Penentu Produksi Tanaman Florikultura	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta; Jawa Tengah (Semarang); DI Yogyakarta; Jawa Timur; NAD; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Jambi; Sumatera Selatan; Lampung; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Bali; Nusa Tenggara Barat; Bengkulu; Banten; Bangka Belitung; Gorontalo; Kepulauan Riau.	Jawa Barat	Maret
4	Sosialisasi Pedoman-pedoman Pengelolaan Pengembangan Tanaman Florikultura (Rancang Bangun, Kelembagaan, dll)	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta; Jawa Tengah (Semarang); DI Yogyakarta; Jawa Timur; NAD; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Jambi; Sumatera Selatan; Lampung; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Bali; Nusa Tenggara Barat; Bengkulu; Banten; Bangka Belitung; Gorontalo; Kepulauan Riau.	DI Yogyakarta	April
5	Sosialisasi GHP, Registrasi Kebun dan Penataan Rantai Pasok	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta; Jawa Tengah (Semarang); DI Yogyakarta; Jawa Timur; NAD; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; Jambi; Sumatera Selatan; Lampung; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Bali; Nusa Tenggara Barat; Bengkulu; Banten; Bangka Belitung; Gorontalo; Kepulauan Riau.	Jawa Barat	Mei
6	Promosi Tanaman Florikultura (PF2N)	Dinas Pertanian Provinsi Kab/Kota DKI Jakarta; Jawa Barat (Bandung, Bogor, Cianjur, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung Barat, Kota Depok, Sumedang); Jawa Tengah (Kota Semarang, Magelang, Boyolali, Wonosobo, Karanganyar, Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan); DI Yogyakarta (Sleman); Jawa Timur (Malang, Kota Batu, Pasuruan, Gresik); NAD; Sumatera Utara (Tanah Karo); Sumatera Barat (Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Tanah Datar, Agam, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Solok); Riau (Kampar, Kota Pekanbaru); Jambi; Sumatera Selatan; Lampung (Lampung Barat); Kalimantan Barat (Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur (Kota Balikpapan); Sulawesi Utara (Kota Tomohon); Sulawesi Tengah (Kota Palu); Sulawesi Selatan (Bantaeng); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari); Bali (Gianyar, Tabanan, Karangasem); Nusa Tenggara Barat;	Bali	Sep-Okt

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura | 2011

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
		Bengkulu; Banten (Tangerang, Kota Tangerang); Bangka Belitung; Gorontalo; Kepulauan Riau (Bintan).		
7	Temu Koordinasi Kawasan Gerbang Ekspor di Riau	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi Kab/Kota Sumatera Barat (Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Agam, Payakumbuh, Padang, Solok); Riau (Kampar, Pekanbaru); Kepulauan Riau (Bintan)	Riau	April
8	Temu Koordinasi Kawasan Gerbang Ekspor di Kepulauan Riau	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi Kab/Kota Sumatera Barat (Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Agam, Payakumbuh, Padang, Solok); Riau (Kampar, Pekanbaru); Kepulauan Riau (Bintan)	Kepulauan Riau	September
9	Workshop Integrasi Anggrek di Kalimantan Barat	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi Kab/Kota Kalimantan Timur (Balikpapan); Kalimantan Selatan; Kalimantan Barat (Pontianak)	Kalimantan Barat	Mei
10	Workshop Integrasi Anggrek di Kalimantan Timur	Kabid Horti Dinas Pertanian Provinsi Kab/Kota Kalimantan Barat (Pontianak); Kalimantan Timur (Balikpapan); Kalimantan Selatan;	Kalimantan Timur	Okt

5. Direktorat Perbenihan

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1	Koordinasi Perbenihan Tanaman Hias	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Hias	Pontianak	April
2	Pertemuan Penangkar Benih Tanaman Hias Ekspor	Diperta Propinsi/Kab di Sumbar, Riau dan Kepri	Pekanbaru	Juli
3	Pertemuan Penangkar Benih Tanaman Anggrek (Jatim)	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Anggrek	Malang	Nopember
4	Pertemuan Penangkar Benih Tanaman Kisan (Jabar)	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Kisan	Bandung	Juni
5	Apresiasi Pengelolaan Labkujlar	Petugas Laboratorium kultur Jaringan	Jakarta	September
6	Pertemuan Pemantapan Penangkar Benih Kisan di Kota Tomohon	Diperta Propinsi, BBI serta penangkar benih kisan di Sulut dan Sulsel	Tomohon	Mei
7	Penyusunan Draf Sertifikasi Benih Hortikultura	Pengawas Benih Tanaman (32 Provinsi)	Bogor	Maret
8	Sinkronisasi Sertifikasi Benih Hortikultura	Pengawas Benih Tanaman (32 Provinsi)	Bogor	Mei
9	Apresiasi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Pengawas Benih Tanaman (32 Provinsi)	Bogor	Juni
10	Sinkronisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	PPNS Perbenihan	Bogor	Agustus
11	Sosialisasi Pendoman Pelepasan Varietas	Produsen Benih	Bogor	April
12	Workshop Pengolahan Data Statistik	Produsen Benih	Bogor	Mei
13	Penyusunan Standard Deskripsi Jenis Tanaman Hortikultura	PBT, Produsen Benih	Bogor	Juli
14	Penyusunan Pedoman Permuanian Varietas Sayuran	PBT, Produsen Benih	Bogor	Maret
15	Revitalisasi Perbenihan Jeruk	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Buah	Malang	Juli
16	Apresiasi Pengelolaan BF-BPMT Jeruk	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Buah	Malang	September
17	Temu Koordinasi Pengembangan Durian	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Buah	Semarang/Kaltim	Juni
18	Workshop Perbenihan Tanaman Buah	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Buah	Jawa Barat	Agustus

No	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
19	Apresiasi Pengembangan Nanas dan Pisang	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Buah	Kalimantan Barat	November
20	Apresiasi Pengembangan Markisa dan Strawberry	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Buah	Jawa Barat	Mei
21	Koordinasi Perbenihan Kentang	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Sayuran	Sulawesi Utara	September
22	Pemantapan Perbenihan Bawang Merah	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Sayuran	Jawa Timur	Mei
23	Apresiasi Teknologi Produksi Benih Sayur	Diperta Propinsi/Kab sentra Perbenihan Tan. Sayuran	Jawa Barat	Oktober
24	Pembinaan Perbenihan Tanaman Obat	Petugas Perbenihan	Jawa Tengah	Juni
25	Forum Perbenihan Hortikultura	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Propinsi, Kepala BPSB, Kepala BBI	Bali	Oktober
26	Evaluasi Kebutuhan dan Produksi Benih	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Propinsi, Kepala BPSB, Kepala BBI	Kalimantan Barat	November

6. Direktorat Perlindungan Hortikultura

No.	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
1.	Temu Teknis Perlindungan Hortikultura	Dinas Pertanian dan BPTPH Seluruh Indonesia	Sumatera Utara	Maret 2011
2.	Penyusunan Program Perlindungan Hortikultura	Dinas Pertanian dan BPTPH Seluruh Indonesia	Kalimantan Barat	Juni 2011
3.	Pemantapan Program Perlindungan Hortikultura	Dinas Pertanian dan BPTPH Seluruh Indonesia	Jawa Timur	Oktober 2011
4.	Evaluasi Perlindungan Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian dan BPTPH Seluruh Indonesia	Jawa Timur	November 2011
5.	Workshop Pengembangan SIM OPT Hortikultura	Dinas Pertanian dan BPTPH Seluruh Indonesia	Jawa Barat	April 2011
6.	Workshop Kompetensi POPT	Dinas Pertanian dan BPTPH Seluruh Indonesia	Jawa Barat	Mei 2011
1.	Pokja Penanggulangan NSK (Tinjauan Lapang Penerapan Penanggulangan NSK pada Tanaman Kentang)	Sumut, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Sulsel, Sulut	Jawa Timur	Juli 2011
2.	Pokja Penanggulangan Virus Kuning (Sosialisasi Rekomendasi Penanggulangan Virus Kuning pada Tanaman Sayuran)	NAD, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim	Jawa Timur	Juni 2011
3.	Komisi Perlindungan Tanaman I	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Maret 2011
4.	Komisi Perlindungan Tanaman II	Jawa Barat	Jawa Barat	November 2011
5.	Pokja Penanggulangan Penyakit Layu Pisang (Sosialisasi Rekomendasi Penanggulangan Penyakit Layu Pisang)	NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku Utara, Jatisari	Makassar	April 2011

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura **2011**

No.	Kegiatan	Peserta Daerah	Tempat	Waktu
6.	Pokja Penanggulangan Lalat Buah (Sosialisasi Rekomendasi Penanggulangan Lalat Buah)	Sumut, Sumbar, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, BBPOPT Jatisari	Jawa Timur	Mei 2011
7.	Kaji Ulang Metode Pengamatan dan Pelaporan OPT Hortikultura (Wilayah Timur)	NTT, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulut, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Sulawesi Selatan	Mei 2011
8.	Sosialisasi Agens Hayati dan Biopestisida Hasil Kajian Oleh Perguruan Tinggi / Litbang (PF2N)	Sudah dirancang masing-masing propinsi	Bali	Oktober 2011
9.	Peningkatan Kemampuan Pengelolaan OPT Tanaman Hortikultura di Lapangan (MPTHI)	Sudah dirancang masing-masing propinsi	Sumatera Selatan	Oktober 2011
10.	Workshop Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim terhadap Tanaman Hortikultura	Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sulbar, Sulut	D.I Yogyakarta	Juni 2011
11.	Workshop Teknik Pengambilan Sampel Produk Hortikultura	NAD, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim, Bali, NTB, Kalsel, Kalbar	Jawa Barat	April 2011
12.	Workshop Pengelolaan Penyakit HLB pada Tanaman Jeruk	NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, BBPOPT Jatisari	Jawa Timur	Juni 2011
13.	Workshop Pengelolaan Penyakit Mati Meranggas	Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim, Bali, NTB, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Sulut, BBPOPT Jatisari.	Jawa Barat	Juli 2011
14.	Workshop Identifikasi dan Pengelolaan OPT Tanaman Krisan	Jateng, D.I.Y, Jatim, Sulut,	Jawa Barat	Juni 2011
15.	Workshop Identifikasi dan Pengelolaan OPT Tanaman Leather Leaf	Jateng	Jawa Tengah	Juli 2011
16.	Workshop Identifikasi dan Pengelolaan OPT Pasca Panen	Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim, Bali, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Sulut, BBPOPT Jatisari	Jawa Barat	Agustus 2011
17.	Konsolidasi Hasil Surveilans (2x)	(12 Propinsi Sinergisme : Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jabar, Jateng, D.I.Y, Jatim, DKI Jakarta, Kalbar, NTB, Bali)	D. I Yogyakarta, Jawa Tengah	Juni 2011 September 2011

Lampiran 2 :

**Contoh Formulir A, B , dan C Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan APBN
Pembangunan Pertanian**

Formulir A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN XX TA 20XX**

I. DATA UMUM

1. Nomor kode dan Nama Unit Organisasi : Diisi sesuai kode dan nama unit organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama program
5. Indikator Hasil : Diisi
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA
7. Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke : misal 1/1 (1 thn dan th pertama)
8. Penanggung jawab Kegiatan : Sudah Jelas
9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Kegiatan : Sudah Jelas
10. Nomor Urut Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA

Nomor kode dan nama sub kegiatan	Anggaran (000)				Indikator Keluaran (<i>output</i>)	Satuan (Unit)
	No Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
Total						

II. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan	S/D Triwulan lalu (%)			Triwulan ini (%)			S/D Triwulan ini (%)			Lokasi			
	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik				
	S	R		S	R		S	R			S	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

S = Sasaran; R= Realisasi

*) Untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

III. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Kendala	Tindaklanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....

Penanggungjawab Kegiatan

.....

NIP

**LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM
TRIWULAN XX TAHUN 20XX**

Formulir B

Unit Organisasi :
 Nomor Surat Pengesahan DIPA :
 Nomor Kode dan Nama Program :
 Indikator hasil :

Nomor Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran (000)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Lokasi
	No Loan	PHLN	RM	Total	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

S= Sasaran; R=Realisasi

*)Untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Kendala	Tindaklanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....,

Penanggungjawab Kegiatan

.....

NIP

**LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
DIRINCI MENURUT KEGIATAN
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 20XX**

DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROPINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD :														
No	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran (000)			Penyerapan			Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung jawab	lokasi
			No Loan	PHLN	Rupiah	Total	S	R	Narasi	Satuan (unit)	S	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program A												
		Indikator Hasil												
		Kegiatan 1												
		Kegiatan 2												
		Kegiatan 3												
		Program B												
		Indikator Hasil												
		Kegiatan 1												
		Kegiatan 2												
		Kegiatan 3												
		Program C												
		Indikator Hasil												
		Kegiatan 1												
		Kegiatan 2												
		Kegiatan 3												
		Jumlah												

S= Sasaran; R=Realisasi

*)Untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

Lanjutan Formulir C

**LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM
TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 20XX**

Kode	Fungsi/Sub Fungsi/Program	Anggaran (000)			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Hasil *)				Instansi Penanggung-jawab
		PHLN	Rupiah	TOTAL	T	R	Narasi	Satuan (Unit)	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	Fungsi A										
Xx	Sub Fungsi AA										
Xxxx	Program A1										
xxxx	Program A2										
xxxx	Program A3										
Xx	Sub Fungsi AB										
Xxxx	Program B1										
xxxx	Program B2										
xxxx	Program B3										
X	Fungsi B										
Xx	Sub Fungsi BB										
Xxxx	Program B1										
xxxx	Program B2										
xxxx	Program B3										
	Jumlah										

Lanjutan Formulir C

KENDALA DAN LANGKAH TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kode	Program/ Kegiatan	Kendala	Tindaklanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

.....
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala SKPD/
Kepala Bappeda

.....
NIP

**Lampiran 3 :
Contoh Formulir/Tabel SIMONEV (Versi Tahun 2011)**

Tabel 1. Data Umum dan Keuangan

A. DATA UMUM

1. Propinsi	
Kabupaten	
2. Nama Instansi/Dinas/Kantor	
Alamat	
3. Nama Satuan Kerja	
4. Nomor Satker	
5. Nomor SP DIPA	
6. Nama Kuasa Pengguna Anggaran	
NIP	
7. Nama Bendahara Pengeluaran	
NIP	
8. Eselon I terkait	
9. Bulan dan Tahun Laporan	
10. Email Address	

B. DATA KEUANGAN

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Jumlah Dana Satker (Rupiah Murni) | : | |
| a. Dekonsentrasi Rp. | : | |
| b. Tugas Pembantuan Rp. | : | |
| 2. Jumlah Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (equivalen-Rp) | : | |
| 3. Jumlah Seluruhnya | : | |
| 4. Jumlah Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | : | |
| 5. Sumber Dana Lainnya | : | |
| a. Dana APBD | : | |
| b. Dana Alokasi Khusus (DAK) | : | |

Tabel 2. RINGKASAN SATUAN KERJA/DIPA (Contoh)

A. Latar Belakang/Justifikasi

Pengembangan agribisnis hortikultura diproyeksikan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam sistem perekonomian nasional, baik secara makro, regional dan lokal. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan fokus pemantapan sentra yang sudah ada dan penumbuhan sentra-sentra baru.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran mendorong berkembangnya agribisnis hortikultura melalui pengembangan subsistem hulu, budidaya, pengolahan, pemasaran dan subsistem penunjang sebagai kesatuan sistem agribisnis yang sinergis mampu menghasilkan produk pertanian dan industri pertanian yang berdaya saing, menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan produsen yang mendukung pertumbuhan pendapatan nasional.

C. Kegiatan

1503-9815-'0012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKHNIS
1503-9815-'0040 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
1503-9815-'1362 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

D. Output Kegiatan

- a. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanian terpadu dan terbinanya 23 Orang Petugas dan Petani
- b. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan Kemitraan Usaha Serta Terbinanya 23 Orang Petugas dan Petani
- c. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknologi Penerapan Komoditas Dengan Mengikutsertakan Petani Komoditas dari Kabupaten Yang Bersangkutan.

Tabel 3.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN PER PROGRAM TA. xxx
BULAN : xxx

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU DIPA Rp %	REALISASI BULAN INI Rp %	RENCANA KUMULATIF S/D BULAN INI Rp %	REALISASI KUMULATIF S/D BULAN INI Rp %	SISA ANGGARAN S/D BULAN INI Rp.
	TOTAL PROGRAM					

Tabel 4.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN PER BULAN TA xxx
Menurut Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bulan : xxx

KODE	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU DIPA Rp. %	REALISASI BULAN INI Rp. %	RENCANA KUMULATIF S/D BULAN INI Rp. %	REALISASI KUMULATIF S/D BULAN INI Rp. %	SISA ANGGARAN S/D BULAN INI Rp.
	JUMLAH KEGIATAN					

Tabel 5.
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN PER BULAN TA xxx
Menurut Jenis Belanja
Bulan : xxx

KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	(% TASE)	REALISASI BULAN INI	RENCANA KUMULATIF S/D BULAN INI	REALISASI KUMULATIF S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN S/D BULAN INI
51	Belanja Pegawai						
52	Belanja Barang						
53	Belanja Modal						
57	Belanja Bantuan Sosial/BLM						
58	Belanja Lainnya						
	JUMLAH BELANJA						

Tabel 6.
LAPORAN KEUANGAN REALISASI SPM DAN SP2D TAHUN ANGGARAN xxx
MENURUT PROGRAM, JENIS BELANJA DAN MAK
Bulan : xxx

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN REVISI	REALISASI								%	SISA ANGGARAN
			BULAN YANG LALU		BULAN INI			S/D BULAN INI				
			SPM	SP2D	5	6	7	SPM	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Program Penyeleng- garaanKepemerintahan yang Baik											
A	Belanja Pegawai											
	- Gaji Tunjangan											
	- Honor Tidak Tetap											
B	Belanja Barang											
	- Belanja Barang											
	- Belanja Jasa											
	- Belanja Perjalanan											
C	Belanja Modal											
	- Tanah											
	- Peralatan dan Mesin											
	- Gedung											
	- Jalan, Irigasi											
	- Modal Fisik											

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN REVISI	REALISASI								%	SISA ANGGARAN
			BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI					
			SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
D	Belanja Sosial											
	- Bantuan Sosial											
	Sub Total :											
	TOTAL :											
II	Program Pengembangan Agribisnis											
A	Belanja Pegawai											
	- Gaji Tunjangan											
	- Honor Tidak Tetap											
B	Belanja Barang											
	- Belanja Barang											
	- Belanja Jasa											
	- Belanja Perjalanan											
C	Belanja Modal											
	- Tanah											
	- Peralatan dan Mesin											
	- Gedung											
	- Jalan, Irigasi											
	- Modal Fisik											
D	Belanja Sosial											

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN / ANGGARAN REVISI	REALISASI								% 	SISA ANGGARAN
			BULAN YANG LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI					
			SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Bantuan Sosial											
	Sub Total :											
	TOTAL :											

Tabel 7
EVALUASI KINERJA KEGIATAN (Contoh)
TRIWULAN xx

A. Outcome

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petugas dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, akselerator, dinamisor dan regulator.
- Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan kemitraan usaha.
- Meningkatkan kualitas petani komoditas dan petugas hortikultura

B. Benefit

Berjalannya sistem dan usaha agribisnis hortikultura di Propinsi, lancarnya lalu lintas data, informasi dan pelaporan perbenihan dan statistik hortikultura terlaksananya program revitalisasi .

C. Keberhasilan dan Permasalahan

Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan ini adalah pembinaan pertanian terpadu yang diikuti oleh petugas dari provinsi/kab/kota dan Pelatihan Penerapan Teknologi komoditas ke propinsi yang diikuti oleh petugas provinsi, petugas kabupaten, petani komoditas dari kabupaten dan kota.

...../ 20XX

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 Nip.

Lampiran 4: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam pengertiannya sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat **SAI** adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat **SIMAK-BMN** adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber untuk penyusunan neraca dan laporan BMN
3. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat alokasi dana tugas pembantuan.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat **UAKPB** adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus/menggunakan BMN.
5. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat **UAPPB-W** adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB.
6. UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintahan Daerah Propinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan dana dekonsentrasi.
7. UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

8. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang bertanggungjawab adalah pejabat Eselon I.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
10. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan/daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK.
11. Rekonsiliasi adalah Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem berdasarkan dokumen sumber yang sama

Lampiran 5 : Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

A. Sistem Akuntansi Keuangan

Ketentuan tentang pelaporan SAK dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (**UAKPA**) wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (**LRA**), Neraca, dan Catatan Laporan Keuangan Satuan Kerja.
2. Data Sumber (DS) yang berhubungan dengan pengadaan aset disampaikan ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
3. **UAKPA** wajib memproses DS untuk menghasilkan LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK).
5. UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan
6. UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK kepada UAPPA-W/UAPPA-Eselon I setiap bulan.

Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan oleh setiap UAKPA mengikuti alur sebagai berikut :

1. UAPPA- E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1.
2. UAPPA-E menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.

3. UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan.
4. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan setiap semester.
5. UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan neraca tingkat UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.
6. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Pelaporan Keuangan atas Dana Dekonsentrasi

1. SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi
2. Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD
3. Penanggung jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi
4. Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Gubernur
5. UAKPA Dekonsentrasi wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca dan Catatan Laporan Keuangan
6. UAKPA Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan
7. UAKPA dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN
8. UAKPA Dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melaksanakan tugas pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan yang berasal dari UAKPA Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya
2. UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi
3. UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing masing setiap bulan.
4. UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.
5. UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi beserta ADK kepada UAPPA-EI dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi tiap bulan.
6. UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraca dan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

C. Pelaporan Keuangan atas Dana Tugas Pembantuan

1. SKDP yang mendapatkan alokasi dana untuk tugas pembantuan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan.
2. Penanggung jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepada SKPD.
3. UAKPA Tugas Pembantuan wajib memproses DS (Dokumen Sumber) untuk menghasilkan pelaporan keuangan berupa LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. UAKPA Tugas Pembantuan Wajib menyampaikan LRA dan Neraca berserta ADK setiap bulan ke KPPN.
5. UAKPA Tugas Pembantuan melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
6. AUPKA Tugas Pembantuan menyampaikan LRA dan Neraca dan ADK setiap bulan ke UAPPA- W Tugas Pembantuan dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan.
7. UAKPPA Tugas Pembantuan menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa LRA, Neraca dan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melaksanakan tugas pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi yang melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAPPA-W dana Dekonsentrasi
2. Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun laporan keuangan Dana Dekonsentrasi berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.
3. Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan dana Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
4. UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA Tugas Pembantuan.
5. UAPPA-W Tugas Pembantuan menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan.
6. UAPPA-W Tugas Pembantuan wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan berserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
7. UAPPA-W Tugas Pembantuan melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

D. Pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Untuk dapat melaksanakan pelaporan SIMAK BMN maka perlu dibentuk :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB E1)
4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

Dokumen Sumber Barang Milik Negara terdiri dari daftar barang, buku barang, kartu identitas barang (KIB), dokumen inventarisasi BMN. Jenis – Jenis Laporan BMN adalah sebagai berikut :

1. Laporan Barang terdiri dari :
 - a. Laporan Persediaan
 - b. Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan jaringan) meliputi :
 - Laporan intrakomptabel (pencatatan didalam pembukuan)
 - Laporan ektrakomptabel (pencatatan diluar pembukuan)
 - Laporan gabungan intrakomptabel dan ektrakomptabel
 - c. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - d. Laporan Aset Lainnya
 - e. Catatan Ringkas Barang (CRB)
2. Laporan Mutasi BMN
3. Laporan Kondisi Barang (LKB)
4. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
5. Laporan PNPB (yang bersumber dari pengelolaan BMN)

6. Arsip Data Komputer (ADK)

Untuk menghasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS), Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT), Jurnal Transaksi BMN dan daftar /laporan manajerial lainnya maka UAKPB melakukan proses akuntansi atas Dokumen Sumber BMN.

Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas Akuntansi SAK setiap bulan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca dan untuk menjamin keandalan nilai BMN dalam neraca dengan laporan BMN maka UAKPB melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Catatan atas Laporan BMN serta ADK transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB E-1 dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester sedangkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) dan Catatan atas Laporan BMN serta laporan Kondisi Barang disampaikan setiap tahun.

Berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilayahnya maka UAPPB-W menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP-W), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran (LBPP-WS), Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan (LBPP-WT) dan daftar / laporan manajerial lainnya tingkat wilayah.

UAPPB-E1 mempunyai tugas untuk menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 (DBPP-E1), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Semesteran (LBPP-E1S), Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Tahunan (LBPP-E1T) dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Eselon 1 berdasarkan hasil penggabungan berdasarkan laporan BMN seluruh UAPPB-W di Wilayahnya

termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada dibawahnya.

UAPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester dan untuk menjamin keandalan laporan BMN dan laporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura maka UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-E1.

Berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 maka UAPB menyusun Daftar Pengguna Barang (DPB), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LPBT) dan daftar / laporan manajerial lainnya.

UAPB melakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester, LBPS disertai Catatan Atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semester sedangkan LBPT disertai laporan Kondisi Barang dan catatan atas laporan BMN beserta ADK disampaikan setiap tahun.

Pelaporan Barang Milik Negara atas Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Dekonsentrasi melaksanakan proses akuntansi atas dokumen Sumber dalam rangka menyusun DBKP, LBKPS, LBKPS, LBKPT, Jurnal Transaksi BMN dan laporan manajerial lainnya.
2. Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas UAKPA Dekonsentrasi setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca
3. Dalam rangka meyakini keandalan laporan keuangan dan laporan BMN UAKPB Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA Tugas Pembantuan.

4. LBKPS disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan KPKNL setiap semester.
5. LBKPT disertai Laporan Kondisi Barang (LKB) dan Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, KPKNL setiap tahun.
6. UAKPB Dekonsentrasi melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester.

Pelaporan Barang Milik Negara atas Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut :

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Tugas Pembantuan melaksanakan proses akuntansi atas dokumen Sumber dalam rangka menyusun DBKP, LBKPS, LBKPS, LBKPT, Jurnal Transaksi BMN dan laporan manajerial lainnya.
2. Jurnal Transaksi BMN disampaikan kepada petugas UAKPA Tugas Pembantuan setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca
3. Dalam rangka meyakini keandalan laporan keuangan dan laporan BMN UAKPB Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA Dekonsentrasi.
4. LBKPS disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Tugas Pembantuan, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan KPKNL setiap semester.
5. LBKPT disertai Laporan Kondisi Barang (LKB) dan Catatan atas Laporan BMN beserta ADK disampaikan kepada UAPPB-W Tugas Pembantuan, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, KPKNL setiap tahun.
6. UAKPB Tugas Pembantuan melakukan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester.

Lampiran 6.

RINCIAN INDIKATOR, OUTPUT DAN KOMPONEN
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK
TANAMAN BUAH BERKELANJUTAN

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
1	Pengembangan Kawasan Tanaman Buah	1769,02	Pengembangan Kawasan Buah (Ha)	(011)	Pengembangan Kawasan Tanaman Buah
				(012)	Pembuatan Kebun Percontohan
				(013)	Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS)
2	Pengembangan Registrasi Kebun Tanaman Buah	1769,08	Registrasi Kebun (kebun)	(011)	Registrasi Kebun Buah
3	Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah	1769,03	Sekolah Lapang (Kip)	(011)	Sekolah Lapang GAP Buah
4	Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah	1769,12	Pengadaan Sarana Prasarana (unit)	(011)	Fasilitasi Sarana Pasca Panen
5	Pengembangan Registrasi Packing House	1769,10	Registrasi Packing House/ Rumah Kemasan (Packing House)	-	-
6	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Buah	1769,04	Pengembangan/ Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (Lembaga)	(011)	Pengembangan/Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Buah

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
7	Peningkatan Mutu Pembinaan Untuk Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Buah	1769.05	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop (kali)	(011)	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop Mendukung Peningkatan Produksi
				(012)	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop Mendukung Peningkatan Mutu
		1769.07	Pedoman-pedoman (buku)	(011)	Juklak Pengembangan Buah Mendukung Peningkatan Produksi
				(012)	Pedoman Teknologi Produksi
				(013)	Pedoman Teknologi Pasca Panen Mendukung Peningkatan Mutu
		1769.11	Pemasyarakatan/ Promosi (kali)	(011)	Pemasyarakatan/ Promosi Buah
		1769.09	Kendaraan (unit)	(011)	Pengadaan Kendaraan Roda-4
				(012)	Pengadaan Kendaraan Roda-2
		1769.13	Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah (Kab/Kota)	(011)	Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah

Lampiran 7.

**RINCIAN INDIKATOR, OUTPUT DAN KOMPONEN
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK
TANAMAN FLORIKULTURA BERKELANJUTAN**

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
1	Pengutuhan Kawasan Tanaman Florikultura	1770.13	Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (Kecamatan)	(011)	Pengembangan Kawasan Tanaman Hias
				(012)	Inisiasi Pengembangan Tanaman Hias
				(013)	Pemecahan Faktor Penentu Produksi
2	Pengembangan Registrasi Unit Usaha Tanaman Florikultura	1770.08	Registrasi Lahan usaha (Lahan Usaha)	(011)	Registrasi Lahan Usaha Tanaman Hias
3	Perbaikan Mutu Pengelolaan Unit Usaha Tanaman Florikultura	1770.03	Sekolah Lapang (kelompok)	(011)	Sekolah Lapang GAP Tanaman Hias
				(012)	Sekolah Lapang GHP Tanaman Hias Mendukung Peningkatan Mutu
4	Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura	1770.11	Pengadaan Sarana Prasarana (Unit)	(011)	Fasilitasi Sarana Pasca Panen Tanaman Hias
5	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura	1770.04	Pengembangan/ Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (lembaga)	(011)	Pengembangan/ Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Tanaman Hias

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
6	Peningkatan Mutu Pembinaan Untuk Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Florikultura	1770.05	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop (kali)	(011)	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop
		1770.06	Peningkatan Kapabilitas Petani/ Petugas (orang)	(011)	Peningkatan Kapabilitas Petani/ Petugas
		1770.07	Pedoman-pedoman (buku)	(011)	Pedoman-pedoman
		1770.10	Pemasyarakatan/ Promosi (kali)	(011)	Pemasyarakatan Tanaman Florikultura
		1770.12	Pembinaan Pengembangan Tanaman Hias (Kab/Kota)	(011)	Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura
		1770.15	Kendaraan (unit)	(011)	Pengadaan Kendaraan Roda-4
				(012)	Pengadaan Kendaraan Roda-2

Lampiran 8.

**RINCIAN INDIKATOR, OUTPUT DAN KOMPONEN
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK
TANAMAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT BERKELANJUTAN**

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
1	Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1771.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Ha)	(011)	- Pengembangan Kawasan Inisiasi Sayuran dan Biofarmaka - Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka - Pengembangan Kawasan Sayuran Organik - Pengembangan Kawasan Biofarmaka - Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka
				(012)	- Fasilitas Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka Mendukung Peningkatan Produksi
				(013)	- Fasilitas Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka Mendukung Peningkatan Mutu
				(014)	- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan CF-SKR Sayuran dan Biofarmaka - Kawasan Sayuran dan Biofarmaka - Pengembangan Kawasan Sayuran Organik
2	Pengembangan Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1771.08	Registrasi Lahan usaha (lahan usaha)	(011)	Registrasi Lahan usaha Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
3	Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1771.03	Sekolah Lapang (kelompok)	(011)	Sekolah Lapang GAP Sayuran dan Biofarmaka
4	Perbaikan Mutu Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1771.11	Pengadaan Sarana Prasarana (unit)	(011)	Fasilitas Sarana Pasca Panen Sayuran dan Biofarmaka
				(012)	Alat Pengolah Data
				(013)	Sarana Kantor
5	Pengembangan Registrasi Packing House	1771.09	Registrasi Packing House/ Rumah Kemasan (packing house)	-	-
6	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1771.04	Pengembangan/ Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (lembaga)	(011)	Pengembangan/ Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
7	Peningkatan Mutu Pembinaan Untuk Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1771.05	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop (kali)	(011)	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop Mendukung Peningkatan Produksi
				(012)	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop Mendukung Peningkatan Mutu
		1771.06	Peningkatan Kapabilitas Petani/ Petugas (orang)	(011)	Peningkatan Kapabilitas Petani/ Petugas Mendukung Peningkatan Produksi
				(012)	Peningkatan Kapabilitas Petani/ Petugas Mendukung Peningkatan Mutu

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
		1771.07	Pedoman-pedoman (buku)	(011)	Penyusunan SOP Produksi Sayuran dan Biofarmaka
				(012)	Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sayuran dan Biofarmaka
				(013)	Pedoman Teknologi Produksi
				(014)	Road Map/ Rancang Bangun
				(015)	SOP Pasca Panen
				(016)	Pedoman Teknologi Pasca Panen
		1771.10	Pemasyarakatan/ Promosi (kall)	(011)	Pemasyarakatan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka
		1771.12	Pembinaan Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (kab/kota)	(011)	Pengembangan Kawasan
		1771.13	Kendaraan (unit)	(011)	Pengadaan Kendaraan Roda-4
				(012)	Pengadaan Kendaraan Roda-2

Lampiran 9.

**RINCIAN INDIKATOR, OUTPUT DAN KOMPONEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERBENIHAN HORTIKULTURA**

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
1	Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran Bermutu	1772.02	Ketersediaan Benih Tanaman Sayuran (kg)	(011)	Pembinaan Produksi Benih Sayuran di Dinas Pertanian Propinsi
				(012)	Perbanyakan Benih Sayuran
2	Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Florikultura Bermutu	1772.02	Ketersediaan Benih Tanaman Hias (Benih)	(011)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Hias di Dinas Pertanian Propinsi
				(012)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Hias di BBH
3	Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu	1772.04	Ketersediaan Benih Tanaman Obat (Kg)	(011)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Obat di Dinas Pertanian Propinsi
				(012)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Obat di BBH
4	Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Buah Bermutu	1772.05	Ketersediaan Benih Tanaman Buah (Batang)	(011)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Buah di Dinas Pertanian Propinsi
				(012)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Buah di BBH
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perbenihan Hortikultura	1772.09	Pengadaan Sarana Prasarana (unit)	(011)	Pengadaan Sarana Prasarana Perbenihan Hortikultura

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
6	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perbenihan Hortikultura	1772.10	Pengadaan Peralatan Laboratorium (unit)	(011)	Pengadaan Peralatan Laboratorium
7	Peningkatan Mutu Pembinaan Untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1772.08	Pemasyarakatan Benih Bermutu (kali)	(011)	Pengadaan Sarana Prasarana Perbenihan Hortikultura
				(012)	Pemasyarakatan Benih Bermutu
				(013)	Pengembangan Sistem Informasi Perbenihan di Dinas Propinsi
				(014)	Pengembangan Sistem Informasi Perbenihan dan Pelayanan di BBH
		1772.06	Penguatan Kelembagaan (lembaga)	(011)	Penguatan Kelembagaan BPMB Cimanggis
				(012)	Penguatan Kelembagaan Perbenihan
		1772.07	Pengawasan Mutu Benih (laporan)	(011)	Sertifikasi Mutu Benih Hortikultura
				(012)	Pengawasan Peredaran Benih
				(013)	Penilaian dan Pelepasan Varietas Hortikultura
				(014)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Sayuran
				(015)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Hias
				(016)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Biofarmaka
				(017)	Pembinaan Produksi Benih Tanaman Buah

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
		1772.14	Kendaraan (unit)	(011)	Pengadaan Kendaraan Roda-4
				(012)	Pengadaan Kendaraan Roda-2

Lampiran 10.

**RINCIAN INDIKATOR, OUTPUT DAN KOMPONEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA**

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
1	Peningkatan Pengelolaan OPT	1773.06	Pengelolaan dan Pengendalian OPT (kali)	(01.1)	Pengendalian OPT Hortikultura
2	Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim	1773.05	Adaptasi dan Mitasi Perubahan Iklim (rekomendasi)	(01.1)	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Komoditas Hortikultura
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura	1773.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana (unit)	(01.1)	Pengadaan Sarana Prasarana
4	Peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura	1773.08	Pengembangan laboratorium PHP/Lab. Agensi Hayati/Lab. Pestisida (laboratorium)	(01.1)	Pengembangan dan Pemanfaatan Agensi Hayati dan Biopestisida Lab PHP
5	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis SPS Mendukung Ekspor Produk Hortikultura	1773.07	Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura dengan SPS-WTO (draft pest list)	(01.1)	Sinergisme Sistem Perlindungan Hortikultura dengan Sistem SPS-WTO
6	Pengembangan SLPHT	1773.03	SLPHT (kelompok)	(01.1)	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura
7	Peningkatan Mutu Pembinaan Untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	1773.04	Pemasyarakatan/ Promosi (kali)	(01.1)	Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
		1773.09	Pengembangan Klinik PHT	(01.1)	Pengembangan Klinik PHT
		1773.02	Laporan OPT (laporan)	(01.1)	Pengamatan dan Peramalan OPT Hortikultura
		1773.14	Kendaraan (unit)	(01.1)	Pengadaan Kendaraan Roda-2

Lampiran 11.

**RINCIAN INDIKATOR, OUTPUT DAN KOMPONEN
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA
PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
1	Pelayanan Manajemen	1774.02	Layanan Perkantoran (bulan)	(011)	Administrasi Kegiatan
2	Pengelolaan Laporan	1774.05	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (laporan)	(011)	Laporan Monitoring dan Evaluasi
				(012)	Laporan Bidang Kepegawaian
				(013)	Laporan Keuangan
3	Pengelolaan Dokumen	1774.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan (dokumen)	(011)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
				(012)	Penyusunan Dokumen Kerjasama
				(013)	Penyusunan Pengelolaan Kepegawaian
4	Pemberdayaan LM3	1774.09	Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura kepada LM3 (Lembaga)	(011)	Pengembangan Hortikultura Melalui LM3
5	Pemberdayaan Konsorsium	1774.10	Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura kepada Penggerak Membangun Desa (PMD)	(011)	Pengembangan Hortikultura Melalui Penggerak Membangun Desa (PMD)

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
6	Peningkatan Mutu Pembinaan Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	1774.13	Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop (kali)	(011)	Pertemuan Data Statistik
				(012)	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi
				(013)	Pertemuan Dalam Rangka Perencanaan
				(014)	Pertemuan Keuangan dan Perlengkapan
				(015)	Pertemuan Humas dan Protokol
				(016)	Pertemuan Kepegawaian
				(017)	Penguatan Kelembagaan Hortikultura
				(018)	Pertemuan Kerjasama Luar Negeri
		1774.14	Peningkatan Kapabilitas Petugas Bidang Manajemen (orang)	(011)	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Data Informasi
				(012)	Peningkatan Kapasitas Petugas Bidang Perencanaan
				(013)	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kerjasama
		1774.15	Pemasyarakatan/ Promosi (kali)	(011)	Pemasyarakatan Humas dan Protokol
		1774.07	Rancangan Peraturan dan Peraturan Bidang Hortikultura (peraturan)	(011)	Peraturan dan Peraturan Bidang Hortikultura

No	Indikator	No	Output	No	Komponen
		1774.08	Pengadaan Sarana Prasarana (unit)	(011)	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung
		1774.11	Pembangunan/ Renovasi Gedung (m2)	(011)	Pembangunan/ Renovasi Gedung
		1774.12	Pedoman-pedoman (buku)	(011)	Penyusunan Pedoman Perencanaan
		1774.16	Pemberian Penghargaan Perorangan (orang)	(011)	Pemberian Penghargaan Perorangan
		1774.19	Kendaraan (unit)	(011)	Pengadaan Kendaraan Roda-4
				(012)	Pengadaan Kendaraan Roda-2